

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem demokrasi di Negara Republik Indonesia pada hakikatnya bertumpu pada dua fondasi pokok yang menjadi dasar normatif sekaligus filosofis bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pertama, landasan ideologi dari sistem demokrasi tersebut bersumber dari Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Sila ini mengandung prinsip dasar bahwa kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah yang mencerminkan kebijaksanaan kolektif dalam sistem perwakilan. Kedua, prinsip tersebut memperoleh penguatan secara yuridis melalui ketentuan konstitusional yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan secara eksplisit bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rumusan konstitusional ini secara normatif menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip Teori Kedaulatan Rakyat, sekaligus menempatkan dirinya sebagai suatu negara demokrasi konstitusional yang pelaksanaan kekuasaan negaranya dibatasi serta diatur oleh konstitusi.

Implikasi dari penerapan sistem demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia adalah adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sebagai mekanisme formal dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pemilihan umum, yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil

Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pemilihan tersebut diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang memiliki posisi sangat penting dalam penyelenggaraan sistem demokrasi, karena melalui proses tersebut masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dan menyalurkan aspirasi politiknya secara sah. Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif, tetapi juga menjadi ruang evaluatif bagi pemilih dalam menilai kualitas para kandidat yang berkompetisi. Penilaian tersebut umumnya mencakup berbagai aspek penting, seperti tingkat kredibilitas, integritas pribadi, serta komitmen calon terhadap kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks sistem politik Indonesia yang bercirikan multipartai dan memiliki tingkat kemajemukan sosial yang tinggi, perilaku pemilih menunjukkan kecenderungan yang dinamis dan kompleks. Pilihan politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang bersifat rasional seperti pertimbangan program dan kinerja, maupun faktor emosional yang berkaitan dengan persepsi dan kedekatan psikologis. Dalam perkembangan politik kontemporer, salah satu faktor yang semakin menonjol dan memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi preferensi pemilih adalah citra politik (*political image*) yang melekat pada diri seorang kandidat.

Rakhmat (2020:45) mengemukakan bahwa citra politik dapat dipahami sebagai gambaran atau representasi mental yang terbentuk dalam benak masyarakat mengenai seorang tokoh politik. Representasi tersebut berkembang melalui berbagai pengalaman yang dialami masyarakat, proses komunikasi yang dilakukan oleh tokoh tersebut, serta tindakan-tindakan nyata yang ditunjukkan dalam aktivitas politiknya. Dengan demikian, citra politik pada dasarnya tidak terbentuk secara tiba-tiba atau spontan, melainkan merupakan

hasil dari rangkaian proses komunikasi politik yang berlangsung secara terencana, terarah, dan dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Seorang politisi yang berhasil membangun citra positif umumnya memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena figur tersebut dipersepsikan mampu mencerminkan nilai-nilai, harapan, serta kepentingan yang diinginkan oleh publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, keberadaan citra politik yang baik sering kali berfungsi sebagai faktor pembeda yang signifikan di tengah kompetisi yang ketat antar kandidat, terutama pada tingkat kota maupun daerah.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Kota Bandung Tahun 2024 adalah kemunculan figur Soni Daniswara sebagai kandidat anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi tersebut, Soni Daniswara berhasil memperoleh jumlah suara yang cukup signifikan dan menempati posisi kedua tertinggi di Kota Bandung dengan total perolehan sebanyak 4.896 suara. Capaian tersebut tidak terlepas dari strategi kampanye politik yang dijalankannya, salah satunya melalui pengenalan program sosial inovatif yang dikenal dengan sebutan Program Bongsor (Bojongloa Kaler Sosial Respon). Program ini dirancang dengan fokus utama pada kegiatan advokasi serta pendampingan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang berada di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh penulis pada tahap studi pendahuluan, diketahui bahwa Program Bongsor mulai dirintis sejak tahun 2019. Selanjutnya, program tersebut memperoleh legitimasi dari Camat Bojongloa Kaler sehingga secara kelembagaan tim relawan Bongsor secara resmi mulai terbentuk dan beroperasi sejak tanggal 28 Januari 2020.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih mendalam, keberadaan Program Bongsor tidak semata-mata dapat dipahami sebagai aktivitas sosial biasa, melainkan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi politik yang cukup efektif dalam membangun hubungan emosional antara Soni

Daniswara dengan masyarakat. Melalui pelaksanaan program tersebut, interaksi antara kandidat dan warga tidak hanya terbatas pada media kampanye konvensional seperti pemasangan baliho ataupun penyampaian pesan-pesan politik secara verbal dalam kegiatan kampanye. Sebaliknya, kandidat hadir secara langsung melalui berbagai tindakan nyata yang memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Pendekatan semacam ini memungkinkan masyarakat mengenal figur kandidat tidak hanya dari simbol-simbol kampanye, tetapi juga dari kontribusi riil yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sosial mereka.

Fenomena tersebut pada dasarnya selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sudibyo (2021:87), yang menyatakan bahwa proses pembentukan citra politik yang kuat tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan retorika politik atau simbol-simbol kampanye yang bersifat persuasif. Sebaliknya, citra politik yang kokoh justru terbentuk melalui praktik politik yang nyata dan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) di tengah masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut, berbagai kegiatan sosial yang dijalankan, seperti Program Bongsor, dapat dipahami sebagai bentuk strategi komunikasi politik yang bersifat dua arah dan berorientasi pada pelayanan publik serta kepedulian sosial. Pendekatan komunikasi yang demikian memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih dekat antara kandidat dan masyarakat. Selain itu, keberhasilan pola komunikasi semacam ini juga berpotensi memengaruhi dinamika perilaku pemilih, yaitu dengan menggeser pola yang sebelumnya cenderung pasif dan emosional menuju pola yang lebih aktif, rasional, dan evaluatif, di mana masyarakat menilai kandidat berdasarkan kontribusi sosial, kinerja nyata, serta tingkat kebermanfaatannya yang dirasakan oleh publik.

Di sisi lain, dinamika perilaku pemilih (*voter behavior*) dalam konteks politik lokal di Indonesia pada umumnya sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi sosial serta pengalaman langsung masyarakat dalam berhubungan dengan para kandidat yang berkompetisi. Firmansyah (2012:112) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pola keputusan yang diambil oleh

individu maupun kelompok ketika menentukan pilihan politiknya dalam suatu proses pemilihan. Pola keputusan tersebut tidak terbentuk secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya faktor psikologis, kondisi sosial, pertimbangan ekonomi, serta situasi tertentu yang melingkupi proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks masyarakat perkotaan, seperti yang terdapat di Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, karakter pemilih umumnya menunjukkan kecenderungan yang relatif pragmatis. Hal ini tercermin dari pola pertimbangan mereka yang lebih menitikberatkan pada figur atau kandidat yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dibandingkan hanya mempertimbangkan latar belakang partai politik semata. Oleh karena itu, strategi pembentukan citra politik yang berlandaskan pada praktik pelayanan sosial kepada masyarakat menjadi semakin relevan dan penting untuk dianalisis serta dikaji secara ilmiah dalam studi politik kontemporer.

Kecamatan Bojongloa Kaler secara administratif terdiri atas lima kelurahan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 91.193 pemilih yang tersebar di 360 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi demografis wilayah ini memperlihatkan karakteristik kawasan perkotaan yang relatif padat penduduk sekaligus dihuni oleh masyarakat yang bersifat heterogen. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut juga menunjukkan tingkat partisipasi sosial yang cukup tinggi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks sosial seperti ini, keberadaan Program Bongsor muncul sebagai salah satu bentuk aktivitas sosial yang cukup menonjol dan memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat setempat. Program tersebut tidak hanya memberikan dampak yang bersifat sosial maupun ekonomis bagi warga, tetapi juga memiliki implikasi politis. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi positif di kalangan masyarakat terhadap figur Soni Daniswara sebagai seorang politisi yang dipandang memiliki kedekatan dengan rakyat serta menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih relatif terbatas kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji bagaimana proses pembentukan citra politik melalui pelaksanaan program-program sosial dapat memengaruhi perilaku pemilih dalam konteks pemilihan legislatif di Kota Bandung. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya cenderung menitikberatkan perhatian pada analisis citra partai politik ataupun pada strategi kampanye yang memanfaatkan media digital. Sementara itu, dimensi lain yang tidak kalah penting, seperti pelaksanaan program sosial serta intensitas interaksi langsung antara kandidat dan masyarakat, sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian akademik. Padahal, apabila dilihat dalam kerangka budaya politik di Indonesia, figur personal atau personal image seorang kandidat masih memiliki posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan identitas atau afiliasi partai politik yang diusungnya. Oleh karena itu, analisis yang menelaah keterkaitan antara citra politik yang dibangun melalui aktivitas sosial dengan dinamika perilaku pemilih menjadi sangat penting untuk dilakukan secara lebih mendalam.

Walaupun data mengenai perolehan suara menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif antara keberadaan Program Bongsor dengan capaian politik yang diraih oleh Soni Daniswara, kajian terhadap fenomena ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang memerlukan penjelasan lebih lanjut secara akademik. Keberhasilan kandidat tersebut dalam memperoleh jumlah suara yang cukup signifikan, hingga menempatkannya sebagai peraih suara kedua terbanyak di Kota Bandung, memberikan indikasi bahwa strategi komunikasi politik yang berorientasi pada pelayanan sosial berpotensi menjadi alternatif pendekatan yang efektif. Strategi semacam ini dapat menjadi pilihan di tengah praktik politik elektoral yang selama ini sering didominasi oleh fenomena politik uang (*money politics*) maupun pola patronase politik yang bersifat tradisional. Akan tetapi, kondisi tersebut sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai mekanisme spesifik yang menjelaskan bagaimana citra politik yang terbentuk melalui kegiatan advokasi dan pendampingan layanan kesehatan dapat bertransformasi

menjadi keputusan memilih di kalangan masyarakat. Dalam konteks ini, muncul beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan preferensi politik masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler ketika memilih Soni Daniswara, misalnya karena faktor gratitude atau rasa terima kasih atas bantuan yang pernah diberikan, pertimbangan utility yang berkaitan dengan manfaat praktis dari program sosial tersebut, ataupun karena terbentuknya kesadaran politik yang lebih mendalam mengenai peran wakil rakyat sebagai pelayan publik yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini memiliki tingkat relevansi yang cukup tinggi apabila dilihat dari adanya kesenjangan, baik secara teoretis maupun empiris, dalam kajian mengenai perilaku pemilih di Indonesia. Dari sisi teoretis, berbagai model analisis perilaku pemilih selama ini umumnya lebih banyak menekankan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada identifikasi kelompok sosial, pendekatan psikologis yang berfokus pada identifikasi atau kedekatan pemilih dengan partai politik tertentu, serta pendekatan rasional yang mendasarkan pilihan politik pada perhitungan rasional berupa analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*). Namun demikian, fenomena yang berkaitan dengan Program Bongsor memberikan sudut pandang yang relatif berbeda dalam memahami dinamika perilaku pemilih. Kasus ini menghadirkan perspektif baru yang menyoroti peran citra politik yang bersifat transformatif, yang terbentuk melalui proses *social embeddedness* atau keterlekatan sosial yang autentik, nyata, serta berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, dari sisi empiris, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji dan menganalisis pengaruh program sosial yang tidak secara langsung berbasis pada institusi partai politik terhadap perilaku pemilih (*voter behavior*) dalam konteks pemilihan legislatif di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi semakin menarik untuk dikaji, terutama ketika fenomena tersebut terjadi dalam lingkungan masyarakat perkotaan yang secara umum sering dipersepsikan memiliki karakter pemilih yang lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana citra politik Soni Daniswara yang terbentuk melalui pelaksanaan Program Bongsor (Bojongloa Kaler Sosial Respon) memengaruhi perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Bandung Tahun 2024, khususnya di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler. Fokus kajian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif keterkaitan antara strategi pembentukan citra politik yang berbasis pada kegiatan sosial dengan dinamika preferensi politik masyarakat dalam menentukan pilihan elektoralnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran citra politik yang dibangun melalui praktik pelayanan sosial terhadap pembentukan keputusan memilih di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan menjadi fokus kajian. Rumusan masalah tersebut disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap proses analisis serta pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Secara lebih rinci, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk serta strategi yang digunakan dalam proses pembentukan citra politik Soni Daniswara melalui pelaksanaan Program Bongsor di wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung?
2. Bagaimana persepsi, pandangan, serta penilaian masyarakat terhadap citra politik Soni Daniswara yang terbentuk melalui berbagai aktivitas sosial yang dijalankan dalam Program Bongsor?
3. Bagaimana citra politik yang terbentuk melalui implementasi Program Bongsor tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki sejumlah tujuan yang hendak dicapai melalui proses analisis dan pembahasan yang dilakukan. Tujuan tersebut dirumuskan sebagai pedoman untuk mengarahkan fokus kajian sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis berbagai bentuk dan strategi yang digunakan dalam proses pembentukan citra politik Soni Daniswara melalui pelaksanaan Program Bongsor.
2. Mengkaji, menggali, dan memahami secara lebih mendalam bagaimana persepsi, pandangan, serta penilaian masyarakat terhadap citra politik yang terbentuk sebagai hasil dari kegiatan sosial yang dijalankan melalui Program Bongsor.
3. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana citra politik yang terbentuk tersebut memberikan pengaruh, baik secara sosial maupun simbolik, terhadap perilaku memilih masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kaler dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang komunikasi politik, terutama yang berkaitan dengan analisis hubungan antara pembentukan citra politik dan dinamika perilaku pemilih dalam konteks politik lokal di Indonesia. Melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana strategi pencitraan politik yang dibangun melalui aktivitas sosial dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang memiliki minat untuk mengkaji

lebih lanjut mengenai topik komunikasi politik, khususnya yang berkaitan dengan praktik komunikasi politik yang berbasis pada kegiatan sosial di tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan yang konstruktif bagi para praktisi politik, terutama bagi calon anggota legislatif maupun partai politik, dalam merumuskan serta mengembangkan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, beretika, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam merancang pendekatan komunikasi politik yang tidak semata-mata bersifat persuasif, tetapi juga menekankan pada nilai tanggung jawab publik dan kebermanfaatan sosial. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dalam memahami berbagai dinamika yang berkaitan dengan proses pembentukan citra politik seorang kandidat. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu melihat secara lebih kritis hubungan antara citra politik yang dibangun oleh kandidat dengan pola perilaku memilih yang lebih rasional dalam proses pemilihan umum.